

**ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM SISTIM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat
Guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUSN OLEH :

HASRA WAHYUNI
10827003433

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI**

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2015



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004
Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id Email : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM SISTEM KETATA NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002" yang ditulis oleh :

Nama : HASRA WAHYUNI
NIM : 10827003433
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juni 2015
Bertepatan : 14 Rabi'ul Akhir 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 19 Agustus 2015

Dekan



Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. AKBARIZAN, Mag, MPd
NIP. 19711001 199503 1002

SEKRETARIS

KAMIRUDDIN, M.Ag
NIP. 19771018 20051 002

PENGUJI I

H. MOHD. KASTULANI, SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001

PENGUJI II

ASRIL, SH, MH
NIP. 19760420 200901 1 008

ABSTRAK

Salah satu hasil dari Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi supremasi konstitusi. Akibatnya, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara karena semua lembaga negara didudukkan sederajat dalam mekanisme *checks and balances*. Sementara itu, konstitusi diposisikan sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Perkembangan konsep *trias politica* juga turut memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, negara membentuk jenis lembaga negara baru yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara. Maka, berdirilah berbagai lembaga negara independen dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-masing tugas dan wewenangnya.

Beberapa ahli tetap mengelompokkan lembaga negara independen dalam lingkup eksekutif, namun ada pula sarjana yang menempatkannya tersendiri sebagai cabang keempat kekuasaan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, kehadiran lembaga negara independen menjamur pasca perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Berbagai lembaga negara independen tersebut tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam. Beberapa di antaranya berdiri atas amanat konstitusi, namun ada pula yang memperoleh legitimasi berdasarkan undang-undang ataupun keputusan presiden. Salah satu lembaga negara independen yang dibentuk dengan undang-undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Kedepannya, kedudukan lembaga negara independen seperti KPK membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan lebih tegas serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Penulisan Skripsi Ini Yang Berjudul : “**Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasankorupsi (KPK) Dalam Sistim Ketatanegaraan Repuplik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002**” Demikan juga shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah Saw yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menegakkan panji-panji Islam dimuka bumi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan do'a restu dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis pada kesempatan ini secara tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan setinggi- tingginya kepada

1. Ayahnda Alm Nurbahri dan Ibunda Nuraisyah kakanda Halnasroy,S.Ei, adindan Nuzul Alhari,sulastri,S.Pd, kakannda Nurbaina, Abangnda Halmustakri,kakanda Hasnani beserta keluarga besar yang senantiasa mendukung moril maupun materil yang mungkin tidak bisa ananda balas sampai kapanpun, atas ridho dan do'anya yang tiada hentinya selama ananda hidup, dan semoga Allah memberkahi hidupnya di dunia dan akhirat.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, Sh. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak MUHAMMAD DARWIS, SHI.SH. MH, Selaku pembimbing untuk penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sejak mulai dari perencanaan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu proses belajar mengajar selama di bangku kuliah.
7. Pimpinan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku berkaitan dengan penelitian ini.
8. Buat semua seperjuangan Darmawansyah,SH,Hendri kusuma,S.pd.S.Psi, Sutiman/Iman MasterMan rekan-rekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008 Universitas Islmal Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Akhirnya, semoga jasa baik mereka yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah Swt. Amin. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan pengalaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Mei 2014

Penulis

HASRA WAHYUNI

NIM: 10827003433

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Kerangka Teoritis	7
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	
A. Sejarah Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi	19
B. Lembaga Negara Secara Umum.....	23
C. Sistem Pemerintahandan Kelembagaan di Indonesia.....	26
BAB III : LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN	
A. Pengertian Lembaga Negara Independen.....	44

B. Lembaga Negara independen di indonesia.....	50
--	----

**BAB IV : KPK SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DI
INDONESIA**

A. Kedudukan kewenangan KPK Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	58
B. Hubungan Kedudukan Antara KPK Dengan Lembaga-Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA